



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYAFARUDDIN
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 496974

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.776.000.000

1. Tanah Seluas 146 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 400.000.000
2. Bangunan Seluas 31.23 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL  
SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/145 m2 di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL  
SENDIRI Rp. 345.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 875 m2/192 m2 di KAB / KOTA  
OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 4393 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL  
SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 756.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 22.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2017,  
HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, NMAX KENDERAAN RODA DUA Tahun 2017, HASIL  
SENDIRI Rp. 13.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.227.726.268



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.025.726.268
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.025.726.268

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.